

**PENGARUH AKUNTABILITAS KEUANGAN, PENGAWASAN,
DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Pada Pemerintah Kota Dumai)**

Oleh:

Muhammad Alqodri

Pembimbing: Desmiyawati dan Pipin Kurnia

Faculty Of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email: godry_lucky@yahoo.com

*Effect of Financial Accountability, Financial Control and Presentation of
Financial Statements on Local Financial Management In The District
Dumai City*

ABSTRACT

This study aims to examine at the effect of Financial Accountability, Control of Financial and Presentation of Financial Statements on Local Financial Management at the regional work units in the city of Dumai. Research carried out on 33 working units are located in city of Dumai 2014. Sampel that serve as the respondent propovise taken using the sampling method. Each population represented 2 respondents the head SKPD and technical head of the finance department. Questionnaires were distributed to 66 respondents, and successfully recovered the complete answer is obtained from 44 respondents. Data were collected from 44 respondents further data were analyzed with SPSS version 17.0 using descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis to produce the classic assumption test, model of data analysis, coefficient of determination and prove the hypothesis. Partial results of the study found that the variables of financial accountability and presentation of financial statements affect the financial management, while control variables did not affect the financial management. While testing and simultaneously discovered that the variables of financial accountability, financial control, and presentation of financial statements affect the financial management area.

Keywords : Accountability, Control, Report, and Financial Management.

PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada publik. Kewajiban lembaga publik memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan

dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (DPRD dan masyarakat luas). Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara akuntabilitas, transparansi, dan bertanggungjawab.

Akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban tersebut

diharapkan masyarakat terwujud dalam pengelolaan keuangan daerah/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Wujud dari akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dalam pelayanan masyarakat adalah dengan dibuatnya laporan pertanggungjawaban.

Di era reformasi pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rakaian bagaimana suatu Pemerintah Daerah dapat menciptakan *good governance* dan *clean goverment* dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik. Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang di kelola dengan manajemen yang baik pula.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 pasal 3 meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Pengelolaan

keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Fenomena pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dari tulisan yang berhasil di ambil dari media elektronik (internet), ternyata di dalam pengelolaan keuangan pemerintah khususnya Pemerintah Kota Dumai masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah.

Polemik perencanaan dan pembangunan mesjid terapung yang dihadirkan sebagai pengalih perhatian berhasil membius masyarakat. Sementara itu, anggaran fantastis penyertaan modal yang digolkan pada BUMD PT. Pembangunan Dumai sebesar Rp. 7 Miliar dan PDAM Tirta Dumai Bersemai sebesar Rp. 28 Miliar, luput dari perhatian dan sesuai Laporan Realisasi Anggaran Triwulan III s/d September 2014 ternyata anggaran tersebut sudah 'wakwaw' 100 % dicairkan. Jika pencairan dana tersebut tidak digunakan sesuai peruntukannya, maka patut diduga telah terjadi penyimpangan pengelolaan keuangan daerah. Namun, terlepas dari masalah penggunaan dana, legalitas Perda tentang Penyertaan Modal pada ke 2 (dua) BUMD itupun sangat diragukan keabsahannya karena

pembentukannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan fenomena tersebut sehubungan dengan pelaksanaan akuntabilitas, pengawasan, penyajian laporan keuangan, dan pengelolaan keuangan dapat dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah Kota Dumai masih belum seluruhnya memenuhi kriteria dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti hal apa saja yang mungkin mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suparno (2012), akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Liper S (2011), Liper memberikan bukti empiris bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti kembali variabel akuntabilitas keuangan yang memberikan pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Selain akuntabilitas keuangan, pengawasan juga memberikan pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah dimana pengawasan merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah selaku pengelola keuangan daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun sudah berjalan dengan efisien, efektif, dan ekonomis atau belum.

Penelitian sebelumnya juga memberikan hasil yang berbeda, menurut Liper S (2011) pengawasan berpengaruh negatif terhadap pengelolaan keuangan daerah sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Suparno (2012) variabel pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah pemerintah harus melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Mulyana 2006). Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan pengelolaan keuangan yang baik. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan pengelolaan keuangan yang baik.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Peggy Sande (2013) penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Aliyah dan Aida Nahar (2012) yang memberikan bukti empiris bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 1) Apakah akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan? 2) Apakah pengawasan keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan? 3) Apakah penyajian laporan Keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan?

Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap pengelolaan keuangan. 2) Untuk mengetahui pengaruh pengawasan keuangan terhadap pengelolaan keuangan. 3) untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam konteks ini pengelolaan keuangan daerah difokuskan kepada pengelolaan APBD sebagai wujud perencanaan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yaitu entitas penyusun/pengguna APBD untuk pelayanan publik.

Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan”. Atau dalam kata sifat disebut sebagai *accountable*. Lalu apa bedanya dengan *responsibility*

yang juga diartikan sebagai “tanggung jawab”. Pengertian *accountability* dan *responsibility* seringkali diartikan sama. Padahal maknanya jelas sangat berbeda. Beberapa ahli menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan birokrasi, *responsibility* merupakan otoritas yang diberikan atasan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Sedangkan *accountability* merupakan kewajiban untuk menjelaskan bagaimana realisasi otoritas yang diperolehnya

Pengawasan Keuangan

Pengawasan adalah suatu pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diinginkan. Merupakan peran penting dan positif dalam proses manajemen, menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai waktunya. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dalam APBD dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan mandat, visi, misi, tujuan serta target-target operasi organisasi. Mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja tiap instansi yang akan dijadikan parameter penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang

semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan.

Pengaruh Akuntabilitas Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suparno (2012), akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siswandi (2013) dan Magdalena (2014), Siswandi dan Magdalena menemukan bukti empiris bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah kota Medan. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liper S (2011), Liper memberikan bukti empiris bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan fenomena diatas peneliti menduga bahwa ada pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

H₁ : Akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan

Pengaruh Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan

Pengawasan juga memberikan pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah dimana pengawasan merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah selaku pengelola keuangan daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian sebelumnya juga memberikan hasil yang berbeda,

menurut Siregar (2011) dan Magdalena (2014) memberikan bukti empiris bahwa pengawasan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah sementara hasil penelitian berbeda yang dilakukan oleh Suparno (2012) variabel pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

H₂ :Pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan

Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan pengelolaan keuangan yang baik. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah pemerintah harus melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Mulyana 2006). Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya.

H₃ :Penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan

METODE PENELITIAN

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Dinas, Badan, Kecamatan, Dan Kantor pada Pemerintahan Daerah (PEMDA) KotaDumai yang berlokasi di wilayah yang ada di seluruh Kota

Dumai. Sedangkan waktu yang digunakan dalam penelitian ini lebih kurang 2-3 bulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai. Pengambilan sampel (*sampling method*) terhadap responden dilakukan secara *purposive*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2003).

Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah para pejabat/aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu kepala dan pelaksana teknis setiap SKPD, dan oleh jumlah seluruh SKPD yang berada pada pemerintah Kota Dumai sebanyak 33 maka sampel sebanyak 62. Dari setiap SKPD akan diambil 2 responden dengan kriteria kepala SKPD dan pelaksana teknis di setiap SKPD.

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber penelitian yakni dari sumber asli (tidak melalui perantara) yang secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro, 2001;147). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menyebarkan kuisisioner langsung kepada para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Dumai yang berjumlah 33 SKPD. Dari setiap SKPD akan diambil 2 responden dengankriteria kepala SKPD dan pelaksana teknis di setiap SKPD. Sehingga sampel yang diambil dalam

penelitian ini berjumlah 66 responden.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan kuisisioner. Peneliti dalam penelitian ini akan mengkomunikasikan kuisisioner secara langsung kepada responden.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Pengelolaan Keuangan (Y)

Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kuisisioner dalam penelitian ini peneliti adopsi dari penelitian Siregar (2011) dan Suparno (2012), dan sebagian kuisisioner peneliti tambah atau kurangi sesuai judul yang peneliti ambil dengan sumber referensi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun (2011), Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Daftar pertanyaan tersebut terdiri dari lima butir pertanyaan digunakan untuk mengevaluasi kinerja responden. Alternatif jawaban atas daftar pertanyaan tersebut menggunakan skala *Likert* dengan rentang nilai satu sampai dengan lima.

Akuntabilitas Keuangan (X₁)

Akuntabilitas keuangan merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut yaitu

DPRD dan masyarakat luas. Kuisi dalam penelitian ini peneliti adopsi dari penelitian Siregar (2011) dan Suparno (2012), dan sebagian kuisi peneliti tambah atau kurang sesuai judul yang peneliti ambil, diukur dengan skala *Likert* dengan rentang satu sampai dengan lima dan terdapat sembilan butir pertanyaan.

Pengawasan Keuangan (X₂)

Pengawasan keuangan daerah merupakan proses monitoring atau membandingkan antara yang telah direncanakan dengan yang telah dicapai. Pengawasan keuangan daerah perlu untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun sudah berjalan dengan efisien, efektif, dan ekonomi yang dilakukan oleh eksekutif selaku pengguna anggaran. Kuisi dalam penelitian ini peneliti adopsi dari penelitian Siregar (2011) dan Suparno (2012), dan sebagian kuisi peneliti tambah atau kurang sesuai judul yang peneliti ambil, diukur dengan skala *Likert* dengan rentang satu sampai dengan lima dan terdapat sepuluh butir pertanyaan.

Penyajian Laporan Keuangan (X₃)

Penyajian laporan adalah penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Kuisi dalam penelitian ini peneliti adopsi dari penelitian Siregar (2011) dan Suparno (2012), dan sebagian kuisi peneliti tambah atau kurang sesuai judul yang

peneliti ambil, diukur dengan skala *Likert* dengan rentang satu sampai dengan lima dan terdapat delapan butir pertanyaan.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian yaitu : akuntabilitas keuangan, pengawasan, penyajian laporan keuangan, dan pengelolaan keuangan. Penelitian ini menggunakan kisaran teoritis, kisaran Aktual, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi (Ghozali, 2006).

Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen penelitian. Pengujian terhadap kualitas data penelitian ini dapat dilakukan dengan uji validitas dan uji reabilitas. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing pertanyaan akan dapat menjawab sesuai yang dimaksud. Teknik yang digunakan untuk mengukur validitas pertanyaan/pernyataan kuisi adalah Korelasi Product Moment dari Karl Pearson dengan ketentuan : Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka skor butir pertanyaan/pernyataan kuisi valid tetapi sebaliknya jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka skor butir pertanyaan/pernyataan kuisi tidak valid. Sedangkan uji reabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi hasil pengukuran terhadap dua kali atau lebih gejala yang sama. Teknik yang digunakan untuk mengukur reliabilitas penelitian adalah dengan

menggunakan *cronbach alpha*, yaitu instrument dikatakan reliabel jika memiliki nilai *cronbach alpha* > 0,6. Menurut Ghazali (2006) suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan *cronbach alpha* > 0,6.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam data, variabel terikat (*dependent*) dengan variabel bebas (*independent*) keduanya mempunyai hubungan distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah jika distribusi data normal atau tidak dapat dilakukan dengan analisis grafik dan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S).

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian dilakukan untuk menguji apakah model regresi tersebut baik atau tidak. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen dan bila terjadi korelasi berarti terjadinya problem multikolinearitas. Model regresi dikatakan baik bila tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Sedangkan uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah sebuah variabel regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dilihat melalui hasil uji statistik (*Uji Glejser*).

Analisis Data

Setelah pengujian validitas dan reliabilitas, serta setelah dipenuhinya asumsi klasik di atas, maka selanjutnya dilakukan analisis data untuk menjawab hipotesis yang diajukan dengan menggunakan program SPSS. Analisis data untuk menguji hipotesis yang digunakan adalah uji simultan (F) menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Imam Ghazali, 2006), uji koefisien determinan (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen, dan uji hipotesis t untuk mengetahui pengaruh langsung atau tidak langsung dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakter sampel dalam penelitian serta memberikan deskripsi variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Mean	Std. Deviation
AKUNTABILITAS	44	36,68	4,027
PENGAWASAN	44	40,75	4,740
PENYAJIAN	44	33,09	4,486
PENGELOLAAN	44	20,11	2,553
Valid N (listwise)	44		

Sumber: Data olahan SPSS 17.0, 2015

Hasil Uji Kualitas Data

Uji kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian ini dapat dianalisis menggunakan pengujian validitas dan reabilitas. Pengujian validitas untuk instrumen akuntabilitas keuangan dari 9 item pertanyaan, maka untuk keseluruhan item pertanyaan valid, sesuai dengan yang disyaratkan yaitu $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$ (0,297), sehingga secara umum instrumen mampu menjelaskan dimensi akuntabilitas keuangan.

Untuk instrumen pengawasan keuangan, menunjukkan bahwa dari 10 item pertanyaan yang diajukan, maka untuk keseluruhan item pertanyaan valid, sehingga secara umum instrumen mampu menjelaskan dimensi-dimensi dari variabel pengawasan keuangan.

Untuk instrumen penyajian laporan keuangan, menunjukkan bahwa dari 8 item pertanyaan yang diajukan, maka untuk keseluruhan item pertanyaan juga dinyatakan valid, sehingga secara umum instrumen mampu menjelaskan dimensi-dimensi dari penyajian laporan keuangan.

Untuk instrumen pengelolaan keuangan, menunjukkan bahwa dari 5 item pertanyaan yang diajukan, maka untuk keseluruhan item pertanyaan juga dinyatakan valid, sehingga secara umum instrumen mampu menjelaskan dimensi-dimensi dari pengelolaan keuangan.

Pengujian hasil reliabilitas instrumen dengan nilai Cronbach Alpha dengan 9 item pertanyaan untuk Variabel akuntabilitas keuangan adalah 0,780, pertanyaan

untuk Variabel pengawasan dengan 10 item pertanyaan adalah 0,849, 8 item pertanyaan untuk Variabel penyajian laporan keuangan adalah 0,858, dan 5 pertanyaan untuk Variabel pengelolaan keuangan adalah 0,682. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini *reliabel* karena mempunyai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

Hasil Uji Normalitas Data

Berdasarkan grafik normal probability plot dan grafik Histogram menunjukkan bahwa titik-titik (data) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti atau mendekati arah garis diagonal. Sedangkan hasil uji normalitas dengan uji statistik menggunakan Nonparametric Test One-Sample Kolmogorov-Smirnov (1-Sample K-S) dapat terlihat bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov untuk semua persamaan regresi signifikan di atas 0,05 yaitu akuntabilitas keuangan 0,464, pengawasan 0,459, penyajian laporan keuangan 0,248 dan pengelolaan keuangan sebesar 0,392. Dari kedua hasil uji normalitas baik analisis grafik maupun uji statistik dapat disimpulkan bahwa model-model regresi dalam penelitian ini layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas. Uji multikolonieritas digunakan untuk mendeteksi model regresi ditemukan

adanya korelasi antar variabel bebas (independent) atau tidak, dengan melihat signifikansi korelasi diantaranya variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas (Ghozali, 2006). Pengujian multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF). Adanya multikolinieritas dapat diketahui jika nilai tolerance $\leq 0,1$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 .

Dari hasil perhitungan uji Multikolinieritas nilai tolerance menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,1 yaitu akuntabilitas keuangan sebesar 0,273, pengawasan sebesar 0,688, penyajian laporan keuangan sebesar 0,333. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 yaitu untuk akuntabilitas keuangan sebesar 3,660, pengawasan sebesar 1,453, penyajian laporan keuangan sebesar 3,006. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). Pendeteksian ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan

Uji Glejser dengan meregresikan absolut residual (AbsUt) sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen tetap. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada terjadi heteroskedastisitas dan apabila terlihat nilai signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5% maka dapat disimpulkan regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Dari hasil uji heteroskedastisitas diketahui bahwa hasil regresi Variabel independen terhadap variabel dependen yaitu absolute residual model regresi memiliki nilai signifikansi di atas tingkat kepercayaan 5% atau $> 0,05$. Yaitu persamaan regresi akuntabilitas keuangan, pengawasan, dan penyajian laporan keuangan serta pengelolaan keuangan sebagai variabel independen signifikansinya masing masing sebesar 0,862, 0,870, dan 0,382. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas untuk semua regresi pada penelitian ini.

Hasil Pengujian Regresi

Hasil uji statistik F pada table 4.10 dibawah diperoleh nilai F sebesar 31,03 (regresi 1) dengan tingkat signifikan 0,000. Karena tingkat signifikan persamaan regresi lebih kecil dari 0,05 maka dapat dijelaskan bahwa semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a		
Model	T	Sig.
1	(Constant)	1,282
	AKUNTABILITAS	,207
	PENGAWASAN	,001
	PENYAJIAN	,159
F		2,145
Sig.		,038
R Square		31,03
Adjusted R ²		,000 ^b
		,699
		,677

a. Dependent Variable: PENGELOLAAN
Sumber: Data olahan SPSS 17.0, 2015

Pada Tabel 2 hasil uji persamaan regresi yang digunakan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan, dan penyajian laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,699. Hal ini berarti 69,90% variabel pengelolaan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan, dan penyajian laporan keuangan. Sedangkan sebesar 30,10% dijelaskan oleh variabel lain di luar yang diteliti.

PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang diajukan adalah untuk menguji apakah akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan, dan penyajian laporan keuangan berpengaruh secara langsung terhadap pengelolaan keuangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 hasil t test memperlihatkan bahwa variabel akuntabilitas keuangan (x_1) signifikan pada 0,05 dengan probabilitas signifikansinya sebesar 0,001. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif akuntabilitas keuangan terhadap pengelolaan keuangan terbukti. Maka **H1 diterima**, Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Liper Siregar (2011) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dalam organisasi sektor publik yang berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan anggaran akan menciptakan pengelolaan keuangan yang baik.

Magdalena mengungkapkan bahwa di Indonesia, hubungan antara akuntabilitas dengan pengelolaan keuangan mempunyai hubungan positif secara signifikan. Kepala SKPD yang memiliki tanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan (APBD) akan lebih memahami tujuan anggaran. Oleh karena itu kinerja manajer atau kepala SKPD akan dinilai berdasarkan target anggaran yang bisa dicapai, manajer akan bersungguh-sungguh dalam penyusunan anggaran dan menyebabkan meningkatnya pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Sedangkan hasil t test Tabel 2 untuk menjawab hipotesis 2 menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif pengawasan keuangan terhadap pengelolaan keuangan dengan signifikansi 0,159 pada $p > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan, ini berarti **H2 ditolak**.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Suparno (2012) yang menyatakan bahwa sebuah organisasi sektor publik yang memiliki tingkat pengawasan yang tinggi tidak meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena tingkat pengawasan yang tinggi akan menyebabkan pegawai maupun pimpinan mengalami tekanan dalam menjalankan tugasnya. Tekanan membuat seseorang bekerja tidak tenang dan santai karena selalu diawasi. Sebaiknya pengawasan dilakukan sewajarnya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sementara hasil t test Tabel 2 untuk menjawab hipotesis 3 menunjukkan bahwa ada pengaruh positif penyajian laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan dengan signifikansi 0,038 pada $p < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan, ini berarti **H3 diterima**. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sande (2013) yang menyatakan bahwa penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan menciptakan pengelolaan keuangan yang baik pula

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menguji pengaruh akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan, dan penyajian laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan daerah. kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut akuntabilitas keuangan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan keuangan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan maupun kelemahan. Keterbatasan yang perlu diperbaiki pada penelitian-penelitian selanjutnya adalah menggunakan metode ini hanya dengan menggunakan metode survey dengan kuesioner, sehingga memungkinkan terjadinya ketidakjujuran dalam menjawab pertanyaan. Responden yang digunakan dalam penelitian ini hanya melibatkan kepala SKPD dan pelaksana teknis disetiap SKPD yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan yang ada di Kota Dumai. Penelitian ini hanya menggunakan variabel akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan, dan penyajian laporan keuangan sebagai variabel yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah.

Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mempengaruhi implikasi berbagai bidang, dibawah ini dibahas kontribusi dan implikasi tersebut, yaitu :

1. Bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini merupakan aplikasi mengenai hubungan antara akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan, dan penyajian laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih

baik dalam pengembangan ilmu dalam bidang akuntansi dan khususnya bidang penganggaran dan pengelolaannya pada satuan kerja perangkat daerah di seluruh Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penelitian berikutnya. Para peneliti berikutnya dapat menggunakan hasil penelitian ini, dan juga hasil penelitian-penelitian lainnya, sebagai dasar replikasi untuk penelitian berikutnya. Para peneliti berikutnya dapat juga meneliti mengenai hubungan akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan, dan penyajian laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan juga menggunakan variabel-variabel lainnya yang mungkin mempengaruhi pengelolaan keuangan.

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian diatas, maka saran peneliti kepada peneliti selanjutnya adalah penggunaan selain metode survey(kuesioner) seperti metode interview dapat digunakan untuk mendapatkan komunikasi dua arah dengan subyek dan mendapatkan kejujuran jawaban subyek, memperluas cakupan sampel dan populasi yang digunakan, Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel lain yang diduga juga dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan. misalnya seperti menambahkan variabel standar akuntansi pemerintahan, dan transparansi serta menambahkan variabel intervening yang mungkin bisa memediasi hubungan antara variabel yang mempengaruhi pengelolaan keuangan.

2. Bagi pihak Pemerintah atau regulator

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah atau regulator khususnya mengenai pengelolaan keuangan dan penerapannya serta pengaruhnya terhadap kinerja pemerintah daerah untuk kedepannya. Diharapkan dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik akan memberikan dampak positif terhadap kinerja pemerintah sehingga akan tercipta pemerintahan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan responden pada khususnya mengenai hubungan akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan, dan penyajian laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan khususnya yang diterapkan di sektor pemerintahan yang ada di Kota Dumai. Informasi mengenai penerapan akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan, dan penyajian laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh satuan kerja perangkat daerah di Kota Dumai diharapkan dapat menunjukkan bahwa organisasi sektor pemerintah tersebut dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat karena telah menerapkan penganggaran yang baik.

4. Bagi masyarakat

Peran aktif dari masyarakat sangat perlu ditingkatkan lagi terkait pengelolaan keuangan daerah. Karena untuk membentuk suatu pemerintahan yang baik dengan pengelolaan yang baik pula maka

diperlukan juga partisipasi masyarakat didalamnya terkait dengan anggaran dan pengelolaannya. Karena anggaran merupakan uang dan hak rakyat selaku pengguna layanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Siregar, Liper. 2011. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, dan Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Moderator Pada Pemerintah Kota Pematangasiantar*. Tesis Mahasiswa Universitas Negeri Medan.
- Suparno. 2012. *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan*. Tesis Mahasiswa Universitas Negeri Medan.
- Sande, Peggy. 2013. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Siti Aliyah, Aida Nahar. 2012. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten*

Jepara. Jurnal Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama Jepara.

- Siswandi. 2013. *Pengaruh Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi, Serta Efektivitas dan Efesiensi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi Mahasiswa Jurusan Akuntansi Pemerintahan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.

- Magdalena, Tiur. 2014. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Apbd (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang)*. Skripsi Mahasiswa Jurusan Akuntansi Pemerintahan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.

_____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Lampiran 1 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

_____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Lampiran 2 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

_____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Lampiran 3 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

_____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit: Andi Yogyakarta.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeth.

Suwarjono. 2005. Teori Akuntansi : Perencanaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.

BPK RI, Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2012, <http://www.bpk.go.id>, 28 Mei 2014.